

LAPORAN RISET PRILAKU PEMILIH DI KABUPATEN BARRU



**JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT
SULAWESI SELATAN
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemerintahan oleh rakyat ini merupakan bentuk konkrit demokrasi yang artinya akan terjadi persaingan partai politik atau suatu usaha meyakinkan rakyat oleh para calon pemimpin politik agar memilih mereka untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, baik legislatif atau eksekutif di daerah maupun kota.

Dalam menjalani kegiatan demokrasi yang procedural maka di adakanlah kegiatan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan dan pilkades atau yang biasa disebut pemilu untuk memilih calon pemimpin Negara yang baik dan sesuai dengan pilihan rakyat masing masing. Pemilu digunakan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang baik dan jujur dan sekaligus wadah suara rakyat. namun pada pelaksanaannya seringkali rakyat dibingungkan untuk menentukan pilihannya, dikarenakan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif dengan memberikan suapan atau janji-janji belaka kepada rakyat.¹

Sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa suara yang dihasilkan pada pemilu bukan benar-benar suara rakyat. Angka golput yang semakin tinggi dan tingkat antusiasme rakyat pada pemilu yang terkesan acuh tak acuh menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang

¹ <http://rickyaliazar.blogspot.com/2014/06/partisipasi-pemilih-dalam-pemilihan.html> Di Akses Pada tanggal 9 Juni 2015

hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik ².

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi pemilih kepada pasangan calon yang terpilih.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.³

Saat ini bangsa Indonesia telah melewati suatu babak baru dalam pelaksanaan demokrasi, di mana pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada dua kali pemilihan Presiden boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat kandidat baik dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya.

Pasca reformasi tahun 1998 ini banyak mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diantaranya Pemilu tahun

² Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995. h 56

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, h. 140

1999 yang bersifat multipartai, dimana dibukanya kembali kesempatan untuk bergerakinya partai politik secara bebas termaksud mendirikan partai baru.⁴

Kemudian yang sangat signifikan lagi terjadi dalam Pemilu tahun 2004 kemarin, selain multipartai, Pemilu 2004 yang lalu merupakan Pemilu pertama dimana rakyat memilih secara langsung wakil rakyatnya. Pemilihan umum di tahun 2004 itu tentulah merupakan pemilihan umum perdana yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih secara langsung.

Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Tidak cukup sampai disitu perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat memilih secara langsung Presiden dan wakilnya dengan pertimbangan pertimbangan dari masing-masing pemilih, pemilihan umum Presiden dan wakilnya tersebut dilakukan dengan sistim dua putaran. Artinya, kalau ada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Sehingga yang menjadi tujuan pokok adalah adanya pasangan calon yang terpilih yang mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu atau mayoritas mutlak. Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara di tingkat propinsi ataupun Kabupaten/Kota. Pemilihan Presiden secara langsung ini juga berdampak dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti yang diamanatkan UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung sebagaimana proses pemilihan Presiden dalam pemilu 2004 yang lalu, sehingga tingkat keterlibatan publik dalam proses politik kenegaraan semakin lengkap.

⁴ Miriam Budiardjo, 2009, Dasar – Dasar Ilmu Politik. Edisi revisi, Gramedia. Pustaka Utama Jakarta. h 483

Di samping itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini juga merupakan sebuah peluang menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel. Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung termasuk di kabupaten Barru.

Namun setiap proses pemilihan mau berlangsung sistem berubah-ubah dimana tahun 2009 yang model menggunakan sistem mencontreng berbeda sebelumnya dengan cara mencoblos, Namun pada tahun 2014 sistem kembali di rubah sehingga menyebabkan perilaku pemilih itu berubah dengan sendirinya Termasuk masyarakat atau pemilih yang berusia lanjut di Barru.

Namun dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dikatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya KPU mempunyai tugas dan wewenang untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai harapan. Penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam hal ini adalah pemilih itu sendiri. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Maka pendidikan politik kepada calon pemilih menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman politik rakyat agar secara maksimal dapat melibatkan diri dalam proses pemilihan calon dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Barru.

Masyarakat masih melihat proses pemilu sebagai sebuah ajang pencapaian kekuasaan dan tidak memberi manfaat untuk perbaikan kedepan disebabkan para calon anggota legislatif (caleg) sering mengubur janji yang tidak dipenuhi, akibatnya pada pelaksanaan pemilu masyarakat kurang peduli karena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat.

Masyarakat apatis berpandangan bahwa siapa pun yang nantinya bakal terpilih menjadi anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya, selain dari pada itu kelompok ini juga berpandangan bahwa calon anggota legislatif itu-itu saja karna penyebabnya

di pegaruhi dari beberara faktor yang di tinjau dari berbagai sudut pandang, Namun perilaku pemilih dalam masyarakat Barru menjadi bahan objek kajian tersendiri. Masyarakat Apatis melihat bahwa sahnya kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya.

Disinilah peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus dimaksimalkan, dengan gencar melakukan sosialisasi terutama bagi Pemilih Pemula, Kelompok Disabilitas, Masyarakat Pinggiran, dan Masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah.

karena kelompok-kelompok masyarakat tersebut kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dari proses penyelenggaraan pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasi bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

⁵Dengan adanya keadaan seperti ini maka penulis merumuskan suatu penelitian dengan memfokuskan faktor – faktor yang menentukan karakter perilaku pemilih di Kabupaten Barru.

⁵ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7538/709> Di akses Pada tanggal 12 Juni 2015

Berdasarkan latar belakang diatas, Secara umum dapat ditarik rumusan masalah yang berhubungan dengan perilaku Pemilih dalam latar belakang diantaranya sebagai Berikut ?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor–faktor yang menentukan karakter perilaku pemilih di Kabupaten Barru ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis akan mengemukakan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menentukan perilaku pemilih di kabupaten Barru !

D. Manfaat penelitian

1. Untuk menemukan akar dari persoalan–persoalan terkait dengan perilaku pemilih di Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perilaku Pemilih

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Menurut Firmanzah (Efriza, 2012:480) secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan Sosiologi, Psikologi, dan Pilihan Rasional.

Pendekatan Sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan kerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School). (Dieter Roth, 2008).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazarsfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih.

Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu : status Ekonominya, Agamanya, Tempat Tinggalnya, Pekerjaannya dan Usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran

sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi.⁶

Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya. (Dieter Roth, 2008).⁷ Menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan Sosiologis. Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan .

Meski begitu, pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan Sosiologis. Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai,

orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (Party Identification). Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political efficacy).

Namun kritik terhadap dua pendekatan di atas, muncul kemudian dengan asumsi pemilih bukan wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari kemauan dalangnya oleh Anthony Downs dalam *Economic Theory of Democracy* (1957). Artinya, peristiwa-peristiwa politik tertentu dapat mengubah preferensi pilihan

⁶ Afan Gaffar. . *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System*. Yogyakarta:1992 Gadjah Mada University Press h 54.

⁷ Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012)

seseorang. Dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat. Orientasi isu berpusat pada pertanyaan; apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat? Dan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional. Namun terkadang pula para pemilih rasional yang bisa dikatakan sebagai free rider tidak peduli terhadap pemilihan umum, hal ini rasional secara ekonomi.

Sebab utamanya adalah usaha yang diperlukan untuk mendapatkan informasi politik tidak sebanding dengan imbalannya.⁸

Apa arti satu suara dalam pemilihan dengan seratus juta suara. Kemungkinan satu suara tersebut untuk mempengaruhi hasil pemilihan sangatlah kecil. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa pemilih menggunakan hak suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Yang dia dapatkan adalah imbalan emosional. Mungkin kebanggaan karena dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Atau perasaan bahagia karena sudah berusaha membantu rakyat miskin dengan program yang dipilihnya. Apakah program tersebut terlaksana atau tidak sangat kecil hubungannya dengan suara pemilih tersebut. Dan resiko (baik atau buruk) yang ditanggung oleh si pemilih atas pilihannya biasanya sangat kecil. Mencari informasi politik itu mahal dan perlu usaha besar. Karena itu pemilih cenderung tidak melakukannya. Ini adalah apa yang disebut oleh Gordon Tullock (Public Choice Theory) sebagai rational ignorance.⁹

Pemilih sebenarnya tidak selalu rasional dalam menyalurkan suaranya. Mereka tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap berbagai topik (terutama ekonomi) yang sering diusung oleh kandidat. Usaha untuk menambah

⁸ (Anthony Downs: An Economic Theory of Democracy).(1957)

⁹ (Bryan Caplan ; 2007, The Myth of Rational Voter).

pemahaman tentang kandidat memerlukan waktu dan juga pemikiran, bahkan terkadang biaya. Sementara keputusan yang berdasarkan emosi bisa dibilang gratis.

Ini salah satu sebab hasil Pemilu tidak selalu mewakili kepentingan rasional pemilih. Sebab lain adalah karena sistem suara terbanyak tidak selalu bisa mewakili kepentingan sosial yang merupakan agregasi dari berbagai kepentingan individu (Kenneth Arrow's Impossibility Theorem).

"Non voters think it's not worth their while to physically go through the process of voting because their votes won't make any difference, statistically speaking. Some of them don't vote because they want to make informed decisions and the cost to get and process that information is more than the expected benefit. On the other hand, most people who vote are politically ignorant. But this is done rationally. They choose to be ignorant because to be politically informed takes effort. They still go to voting booth because they get rewarded by feeling good having done their civic duty, trying to save the environment, helping the poor or whatever. That feeling is a reward, but not a big reward. So they spend some effort, but not that much that they become well informed. If the reward is bigger they'll probably be more informed."

Apakah ini berarti demokrasi gagal? Bukan gagal, hanya tidak sempurna. Seperti dikatakan Churchill;

"Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time."

Karena manusia ini makhluk rasional, maka ketidakpedulian-nya-pun harus dirasionalisasi. Jadi pemilih tidak akan mengakui bahwa mereka tidak tahu banyak tentang kandidat, tapi cenderung mengaku sudah lebih tahu. Bahkan mereka merasa ketidakpedulian itu suatu kebaikan, misalnya dengan menganggap bahwa politik itu kotor.¹⁰

Menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang

¹⁰ Joko J. Prihatmoko (2005 ; 46)

bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Di samping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka “menunggu” sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Prof. Miriam Budiarjo mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (Contacting) atau (Lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu:

1. Perilaku Memilih Rasional

Perilaku memilih ini, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, Disini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat mana pun. Dan sebagian besar mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu.

2. Perilaku Memilih Emosional

Sementara untuk perilaku memilih ini, Lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti factor Sosiologis, Struktursosial, Ekologi maupun Sosiopsikologi.¹¹

Pemilih dan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan (1990;127). Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Sementara itu menurut Surbakti perilaku memilih adalah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih didalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.¹²

Selanjutnya menurut Firmanzah , ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni:

Pertama, Kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik.

Kedua, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini dimasyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survey dan berbagai hal yang diulas dalam media massa akan menjadi pertimbangan pemilih.

¹¹ Miriam Budiarto 2008;136

¹² surbakti(1997;105

Ketiga, Faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan.

Dalam pembahasan perilaku pemilih, menurut Dieter Roth (2009) menyebutkan bahwa apabila kita membicarakan teori perilaku pemilih, maka tidak ada satu teori yang benar, karena juga tidak ada hanya satu teori mengenai perilaku manusia pada umumnya.¹³

Ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini adalah sebagai berikut : Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Ketiga, teori sosial ekonomi. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya.

Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, Cenderung untuk tidak ikut memilih. Untuk mengkaji mengenai perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada partai tertentu dalam ilmu politik terdapat dua mazhab yang dominan menurut Afan Gaffar, yaitu : Mazhab Columbia dan Mazhab Michigan. Mazhab Columbia dikenal sebagai pendekatan sosiologis, dan mazhab Michigan dikenal dengan pendekatan sosio-psikologis.

¹³ (<http://politik.kompasiana.com/2011/04/13/perilaku-pemilih-di-kotayogyakarta-fenomena-pemilu-2004-dan-2009> diakses pada tanggal 10 juni 2015

Pendekatan sosiologis ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik dari Columbia's University Bureau Of Applied Social Science, sehingga terkenal dengan mashab Colombia (The Columbia School of Electoral Behavior). Kedua teori perilaku pemilih psikologis. Pendekatan ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dari University of Michigan's Survey Research Center, sehingga dalam teorisasi perilaku pemilih dikenal dengan mashab Michigan's.¹⁴

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat yang dikembangkan oleh para ahli politik dan sosiologi. Mereka memandang masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat hirarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu. Perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut :

- (a) pendidikan,
- (b) jabatan / pekerjaan,
- (c) jenis kelamin,
- (d) Usia. (Afan Gaffar, 1992 : 5).

Menurut Seymour M. Lipset, yang dikutip Alwis karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni : Pendapatan, Pendidikan, Pekerjaan, Ras, Jenis Kelamin, Umur, Tempat Tinggal, Situasi, Status dan Organisasi. Menurut hasil penelitian yang pernah mereka lakukan bahwa status sosial ekonomi (Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan dan Kelas Sosial si pemilih), tempat tinggal (Rural atau Urban) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perilaku pemilih.

¹⁴ Dewi Erowati dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember 2004.

Dengan demikian, teori perilaku pemilih sosiologis atau mashab Columbia menekankan bahwa faktor-faktor sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan teori perilaku pemilih psikologis atau mashab Michigan“s lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain :

- 1) Keterkaitan seseorang dengan partai politik,
- 2) Orientasi seseorang terhadap issue-issue,
- 3) Orientasi seseorang terhadap kandidat.¹⁵

Dengan demikian, partai politik, isu dan kandidat merupakan variabel independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilu. Ilmuwan Dennis Kavanagh dalam teorinya mengungkapkan ada lima pendekatan untuk menganalisis tingkah laku pemilih dalam suatu pemilu. Kelima pendekatan itu meliputi:

- (1) Pendekatan struktural,
- (2) Pendekatan sosiologis,
- (3) Pendekatan ekologis,
- (4) Pendekatan psikologis-sosial dan
- (5) Pendekatan rasional.¹⁶

Para pemilih juga dikelompokkan menjadi empat segmen berdasarkan perilaku. Keempat segmen ini dikembangkan oleh Newman sebagai bagian dari political marketing yang bertujuan memenangkan Bill Clinton menjadi Presiden Amerika Serikat yang kedua kalinya tahun 1996. (Adman Nursal, 2004:126)

1. Segmen pemilih rasional, kelompok pemilih ini memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dan menentukan pilihan politiknya.

¹⁵ Alwis, Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau 2001

¹⁶ Efriza, 2012 :482

2. Segmen pemilih emosional, kelompok yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran, dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh faktor personalitas kandidat. 22
3. Segmen pemilih sosial, kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
4. Segmen pemilih situasional, kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dan menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politik jika terjadinya kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku *political explorer* , secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:
 - a. Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum menjatuhkan pilihannya.
 - b. Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
 - c. Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
 - d. Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional. Atau pilihan dengan alasan

romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan awam atau pemilih pemula.¹⁷

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Ramlan Surbakti Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Surbakti menilai perilaku memilih ialah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur

¹⁷ Saifullah Fatah dalam buku political explorer (2012 : 487)

tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang didalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang didalam menentukan pilihannya pada saat pemilu. Hal ini tidak terlepas dari seringnya anggota kelompok, organisasi profesi dan kelompok okupasi berinteraksi satu sama lain sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu dari caleg yang mengikuti pemilu. Gerald Pomper merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (kecendrungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya.¹⁸ Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan private dan public dianggap berpengaruh

¹⁸ A.Rahman Zainuddin : 2006 : 47-48.

terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas 26 dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik. Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebahagian besar masyarakat, Misalnya seorang muslim cenderung untuk memilih partai yang berbasis Islam dan sebaliknya seorang non-muslim cenderung untuk memilih partai non-muslim.

2) Pendekatan psikologis

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi. Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, menurut Greenstein ada 3 yakni:

- a) Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.

b) Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.

c) Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri. Namun, sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni mulai dari lahir sampai dewasa. Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap berkembang dari masa anak-anak. Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar. Anak-anak belajar dari orangtua menganggap isu politik dan sebagainya. Pada tahap kedua, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. Tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

3) Pendekatan Pilihan Rasional

Dua pendekatan terdahulu secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Dimana pendekatan tersebut beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibalik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu

para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan. Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu. Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional¹⁹ Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.²⁰ Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.²¹

Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga

¹⁹ (Ibid : 50)

²⁰ Op.cit 46

²¹ Ramlan Surbakti . *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta, 2010

pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Huntington dan Nelson²² menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik yang bergerak pada suatu garis spektrum yaitu :

a) Partisipasi otonom (Otonomus)

Partisipasi otonom adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Pada jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum, dan sebagainya.

b) Partisipasi Mobilisasi

Partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat signifikan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Dalam bahasa Loekman Soetrisno disebutkan, “kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.” Karena partisipasi politik memiliki sifat spektrum, justifikasi, bahwa ada dua kubu yang saling bertentangan adalah tidak benar pengertian yang tepat dalam konteks tersebut bahwa masyarakat lebih efektif apabila diperintah dengan cara dimobilisasi, tetapi pada saat lain, masyarakat akan lebih sinergis apabila diberi otonomi secara luas ini artinya, partisipasi otonom bisa berbalik secara drastis menuju partisipasi yang dimobilisasi.

²² Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/>) diakses pada 12 juni 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian dalam metode penelitian yang terdiri dari tipe dan dasar penelitian, lokasi penelitian, informan dan unit analisis, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, cukup memberi kemudahan bagi studi perilaku memilih masyarakat. Salah satu metode yang paling biasa digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya secara menyeluruh dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan dasar penelitian adalah menggunakan dasar penelitian Analisis Deskriptif, dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan analisis, dan kemudian peneliti melakukan analisis terhadap masalah tersebut sampai mendapatkan pengetahuan tentang perilaku pemilih di Kabupaten Barru tahun 2015. Dan kecenderungan perilaku pemilih di Kabupaten Barru dalam menjatuhkan pilihannya terhadap kandidat pada pemilihan di Kabupaten Barru tahun 2015.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Barru. Tepatnya Tanete Riaja. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi penelitian merupakan daerah tempat tinggal peneliti bertempat tinggal, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait dengan penelitian nantinya. Selain itu lebih mudah berinteraksi dengan

masyarakat sehingga akan memperoleh dalam hal memperoleh data dari para responden.

C. Unit Analisis

Penelitian ini menempatkan individu sebagai unit analisis. Penelitian yang menggunakan individu sebagai unit analisis hampir tidak ada dalam kajian pemilih di Indonesia, karena selama ini individu di Indonesia selalu dikaitkan dengan kelompok. Individu selalu dikaitkan dengan kelompok atau Patron-Keluarga, Pemimpin Kharismatik, *Peers Group* dll. Karenanya penelitian-penelitian survey lebih mempercayai kelompok ketimbang individu sebagai unit analisis, dan pilihan individu selalu dikaitkan dengan pilihan kelompok.

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa individu kita belum seperti individu di negara-negara maju seperti di Amerika, Jepang, Eropa Barat dan lain-lain yang dianggap sudah independen dalam menentukan pilihan dan lepas dari dominasi kelompoknya. Asumsi bahwa individu di Indonesia belum mandiri dan tergantung pada kelompok atau patron barangkali perlu dikritisi lagi, karena dalam beberapa pemilihan yang sudah dilaksanakan, ada kecenderungan pemilih lebih independen dalam memilih calonnya, tidak terikat erat dalam kelompok dan tidak terbelenggu dalam struktur sosial. Inilah sudut pandang lain terhadap kajian pemilih yang diangkat dalam penelitian ini dengan menempatkan individu sebagai unit analisis.

D. Jenis Data

- a. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun masyarakat yang akan diwawancarai adalah pemilih di kabupaten Barru.
- b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen, hasil penelitian yang terkait

dengan studi. Adapun beberapa buku yang dibaca oleh penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian tentang perilaku memilih, buku tentang perilaku memilih serta literatur maupun informasi tertulis yang berkenaan dengan studi perilaku politik memilih.

E. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenisnya penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai pengetahuan, sikap, perilaku informan yang terkait dengan tujuan studi.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan-informan yang mewakili pemilih di 7 Kecamatan di kabupaten Barru. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancarai, tidak mewakili populasi akan tetapi mewakili informasinya. Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam, penelitian ini akan memfokuskan pada pemilih yang ada di kabupaten Barru.

Adapun informan-informan yang telah di wawancara yakni seperti pada table berikut:

No.	Nama Informan	Usia (Thn)	Pendidikan Terakhir	Desa Kelurahan
1.	Muliati S.Pd.I	23	S.1	Tellunpanua
2.	Hendra		Mahasiswa	Pekkae
3.	A. Wawo Mannoengi, SH	30	S.1	Barru
4.	Wahyullah	20	Mahasiswa	Baru

5.	Rusnia	18	Pelajar	Pao-pao
6.	Jamaluddin	18	pelajar	Lalolang
7.	Halikma, S.Sos	25	S.1	Tanete Riaja
8.	Syamsuddin, S.Pd.I	25	S.1	Pujanting
9.	Sri Devi	23	S.1	Mareto
10.	Muhammad Nur	22	Mahasiswa	Lalolang

2. Dokumentasi / Studi pustaka

Selain itu juga untuk memperdalam studi peneliti akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hasil pemilihan kabupaten baru 2015. Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini Teknik pengolahan data yang digunakan adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku memilih masyarakat pada di kabupaten Barru. Adapun angka-angka yang muncul dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dianalisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya sebagai pelengkap terhadap analisa kualitatif demi pencapaian tujuan penelitian ini.

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Barru, Profil Kabupaten Barru dan Pemilih. Gambaran umum Kabupaten Barru mencakup sejarah kabupaten Barru, keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Barru. Gambaran umum Barru terdiri dari keadaan geografis, kependudukan, sarana dan prasarana, pemerintahan serta visi dan misi Kabupaten Barru dan gambaran umum Pemilih Kabupaten Barru

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARRU

Gambaran umum Kabupaten Barru mencakup sejarah kabupaten Barru, sejarah kabupaten Barru, Peta wilayah Kabupaten, keadaan demografi, kependudukan serta visi- misi Kabupaten Barru dan kondisi politik Kabupaten Barru.

a. Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing- masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi.

Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah ONDER AFDELLING BARRU yang bernaung dibawah AFDELLING PARE PARE sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling dan diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-Pare masing-masing:

- 1) Bekas Selbestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.
- 2) Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.
- 3) Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
- 4) Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Pebruari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan.

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat

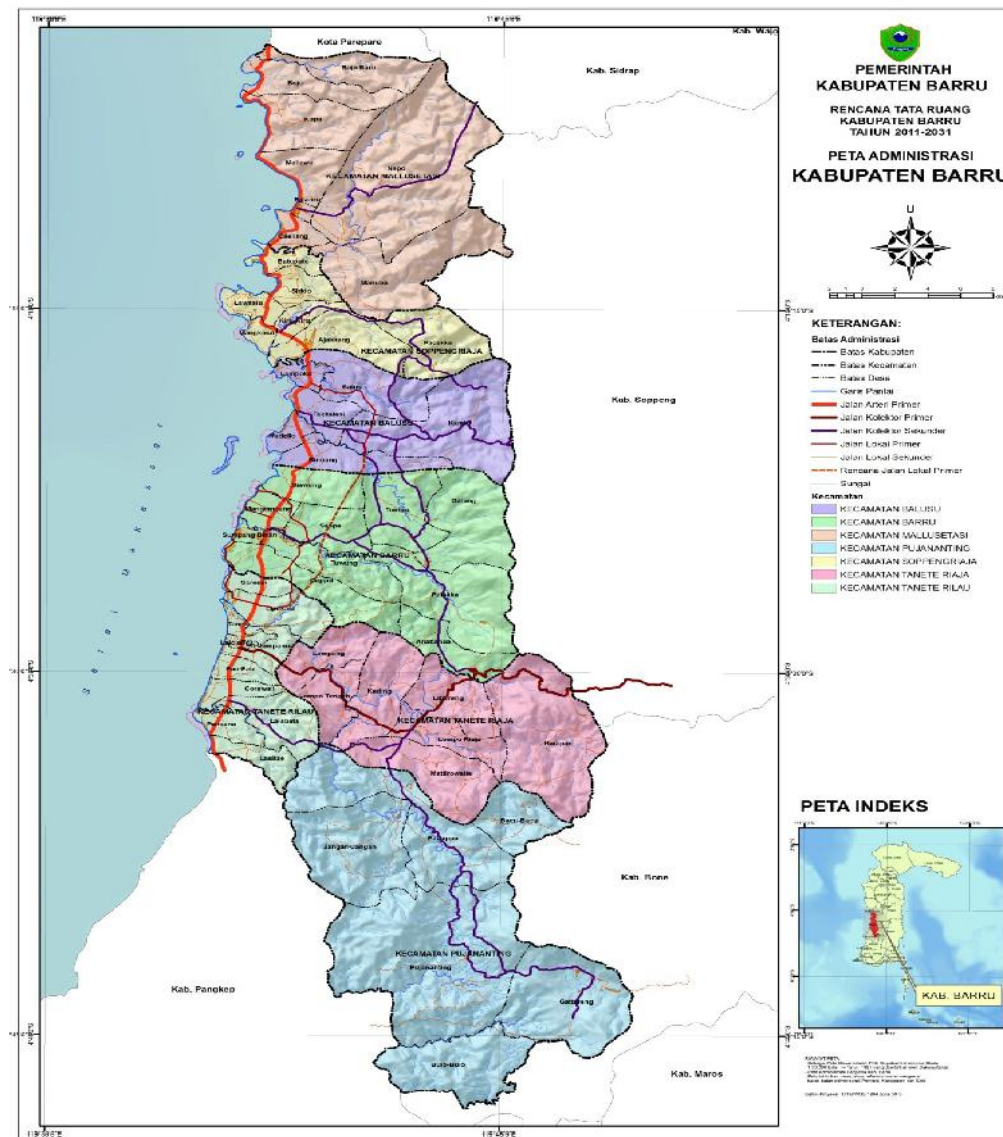
Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km. Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam .Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan selat Makassar.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung - gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai.

Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April - September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember - Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing- masing 104 mm dan 17.

b. Peta Wilayah Kabupaten Barru



Gambar.1 Peta wilayah Kabupaten Barru 2015

c. Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barru, jumlah penduduk Kabupaten pada Tahun 2010 adalah sebesar 162.985 jiwa, yang tersebar di 7 Kecamatan. Dengan jumlah penduduk terbesar yakni Kecamatan Barru dengan penduduk 35.477 jiwa, dan terkecil di kecamatan Pujananting dengan penduduk 12.565 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2010 adalah 123,71 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan

yang ada. Penduduk yang terpadat adalah terdapat di Kecamatan Barru dengan luas wilayah sebesar 199,32 km² dihuni oleh 35.477 jiwa penduduk, memiliki kepadatan 177,99 jiwa/km² (Tabel 1). Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah Kecamatan Pujananting yaitu 12,565 jiwa/km². Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan penduduk Barru secara keseluruhan.

Tabel 1. Nama Kecamatan di Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan (km ²)
1	Tanete Riaja	174,29	21.562	123,71
2	Pujananting	314,26	12.565	39,98
3	Tanete	79,17	33.108	418,19
4	Rilau	199,32	35.477	177,99
5	Barru	78,9	17.885	226,68
6	Soppeng	112,2	17.534	156, 7627
7	Riaja Balusu Mallusetasi	216,58	24.854	114,
Total		1.175	162.985	138,74

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru tahun 2014

d.

Visi dan Misi

Berbagai isu Nasional dan Daerah, yang berimplikasi pada isu daerah Kabupaten , seperti kesejahteraan masyarakat, pemerataan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, peluang kerja, perkembangan kawasan cepat tumbuh, pengembang kawasan pantai, lingkungan hidup, perbaikan pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan gizi, kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, dll, perlu mendapat perhatian serta antisipasi bersama, yang kesemuanya perlu didukung oleh para pelaku pembangunan di kabupaten Barru. Sebagaimana

diketahui bahwa pernyataan rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN BARRU LEBIH MAJU, SEJAHTERA, TAAT AZAS DAN BERMARTABAT YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN"

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

- Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat.
- Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru.
- Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan.
- Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa
- seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas manusia Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Menciptakan lingkungan yang kondusif mengembangkan interkoneksi wilayah.
- Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah menurunnya angka buta huruf secara signifikan meningkatnya kualitas guru meningkatnya sarana prasarana meningkatnya proses belajar mengajar Meningkatnya Iuaran pendidikan SD, SLTP, SLTA Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit Meningkatnya status gizi masyarakat Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedic Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, teknologi kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya Terkendalikannya pertumbuhan penduduk Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global

2. Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : Berkurangnya jumlah penduduk miskin, Kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier, Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga

mitra lainnya, Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas
Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman
pangan. Meningkatnya produksi ternak unggas, Meningkatnya produksi perikanan
tangkap dan budi-daya, Meningkatnya sarana prasarana penangkapan,
Meningkatnya produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM
Optimalnya eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi
Meningkatnya kelestarian ekologi dan sumber daya alam, Tertanganinya jumlah
penyandang masalah kesejahteraan social Berkembangnya kegiatan kepemudaan,
Berkembangnya kegiatan keolahragaan, Meningkat dan meluasnya apresiasi seni
daerah, Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli,
Berkembangnya destinasi dan event wisata, Berkembangnya partisipasi
perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan
pembangunan, Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat.

3. Terpeliharanya dan Semakin Meningkatnya Kebersamaan Antar Berbagai Unsur Dalam Tatanan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : Berkembang dan
terpeliharanya saling kepercayaan, salingbantu serta kepatuhan kepada norma
kebersamaan, Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
lokal asli, Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan
Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku
politik

4. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Terlestarikannya sumber
daya alam Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik Terciptanya sistem
penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien Terciptanya kesiapan
dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian,
ketahanan pangan, gangguan kesehatandan keragaman hayati Terjaganya

keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, lapisan dan pemangku kepentingan. Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada hukum Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

5. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Terpenuhinya kebutuhan jalan jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang, Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat, Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah, Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya, Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis, Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan, Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah

6. Semakin Fungsionalnya Nilai dan Ajaran Agama Dalam Etos dan Budaya Kerja Dalam Tatanan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakatan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

7. Terwujudnya Pelayanan Umum yang Efektif, Efisien dan Memuaskan Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD, Meningkatkan kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan, Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan perwujudan pemerintahan yang baik dan saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Terciptanya pelayanan publik yang prima, Terciptanya

pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan, Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

D.

Kondisi

Politik Kabupaten Barru

Dalam menggambarkan kondisi politik Kabupaten Barru akan dibahas 4 aspek, sebagai berikut: Keanggotaan DPRD Kabupaten Barru, Fraksi DPRD Kabupaten Barru, Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barru, dan Visi dan Misi DPRD Kabupaten Barru.

1. Keanggotaan DPRD Kabupaten Barru

Mengawali hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada lembaga legislatif daerah, perlu diberikan gambaran deskriptif tentang kondisi DPRD Kabupaten tahun 2015 dapat ditelusuri dari segi keanggotaan DPRD Kabupaten Barru sebagai wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Pemilihan Umum anggota legislatif daerah tahun 2014 Kabupaten Barru yang terdiri dari 12 kecamatan dibagi menjadi 3 daerah pemilihan, masing-masing sebagai berikut :

Daerah Pemilihan I : Kecamatan Barru. Daerah Pemilihan II : Kecamatan Malluse Tasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu. Daerah Pemilihan III : Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja , Kecamatan Pujananting.

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Barru menurut data statistik tahun 2013 sebanyak 169.302 jiwa, maka jumlah anggota legislatif daerah dalam DPRD yaitu 25 kursi yang diperebutkan oleh beberapa partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Adapun Partai Politik yang mendapat jatah kursi dan Caleg Terpilih untuk DPRD Kabupaten Barru Periode 2014 s/d 2019, berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), yakni :

Tabel 2. Nama dan Partai Politik mendapat kursi di DPRD
Kabupaten Barru

No.	Nama	Partai	Dapil
1	Rakhman, S.Sos	Nasdem	II
2	Fajar Fitrawan	Nasdem	III
3	Lukman T	Nasdem	III
4	Nur Hasbiah Main,S.Sos	PKS	I
5	H.MannahaliDg.Mattakko	PKS	II
6	Hj. Hamsiati	PKS	III
7	Drs. Arifai Muin	PDIP	I
8	Andi Dharwana	PDIP	II
9	Hasanuddin	PDIP	III
10	Ir. Nurhaidah	GOLKAR	I
11	Hj. A. Nurhudajah Aksa	GOLKAR	II
12	Hj. Marwa, S.Sos	GOLKAR	II
13	H. Djamaluddin Is, SE	GOLKAR	III
14	Hacing,S.Sos	GOLKAR	III
15	Muh. Ikbali, SE	GERINDRA	I
16	Andi Arqam Anwar	GERINDRA	II
17	M.Aliffandi Aska, S.Pd	GERINDRA	III
18	Andi Haeruddin, SH	DEMOKRAT	I
19	A. Baso Mannan, S.Sos	DEMOKRAT	II
20	IkwanFatriawan	DEMOKRAT	III
21	Drs. H. AbujahjaMuhammad	PAN	III
22	A. WawoMannojengi, SH	PPP	I
23	H.Sirua Mustafa, S.Sos	PPP	II
24	H.Saharuruddin Sunre, S.Pd. MM	PPP	III
25	Darmaedi	HANURA	II

Sumber: Kantor KPU Kabupaten Barru

Dari 12 Partai Politik ada 3 Partai Politik yang tidak satupun mewakilkan Calegnya yaitu : PKB, PBB dan PKPI terkait penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih, Ketua Panwaslu Kab. Barru, Abd. Mannan Rasul menjelaskan bahwa data yang dimiliki KPU sama dengan data yang dimiliki Panwas, Abd. Mannan Rasul juga menegaskan bagi Partai Politik dan Caleg yang terpilih bilamana tidak memasukkan Laporan Dana Kampanye maka terancam di diskualifikasi dari keikut-sertaannya sebagai peserta Pemilu 2014.²³

²³ Wawan cara, Devis Program Data KPU Kab.Barru, Upi, S.Sos.Barru, senin 15 Juni 2015.

BAB V

PEMBAHASAN UMUM

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu; *Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan* . Teori tentang perilaku memilih dalam pemilihan calonya juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang berlangsung.

Pemilih Menurut lembaga-lembaga survey international seperti *the Pew Research Center* dan Gallup pemilih berusia antara 17 hingga 29 tahun. Namun di artikan pula bahwa pemilih adalah mereka yang telah berusia 17 dan telah memiliki hak suara dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta mengikuti pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.²⁴

Pemilihan adalah salah satu bentuk proses yang demokratis dalam rangka menetapkan pilihan kandidat dalam pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada dengan sifatnya demokratisasi seperti yang berlangsung di Indonesia. Sama halnya juga yang akan dilaksanakan di kabupaten Barru pada tahun 2015 yakni pemilihan kepala daerah. Dimana masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan pemimpin di daerahnya. Pada pemilukada di kabupaten Barru tahun 2015 antusias masyarakat untuk berpartisipasi cukup tinggi dalam proses memilih pemimpin baru masa periode 2015 – 2020.

Namun hal demikian yang ditemukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Berikut petikan informasi dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Barru ketika diwawancarai terkait Perilaku pemilih pada masyarakat Kabupaten Barru dalam menetapkan pilihan kandidat dalam proses pemilihan .

²⁴ UU Pilpres 2008: 7

“untuk perilaku pemilih sendiri, cukup luarbiasa pengaruhnya baik dari segi psikologisnya maupun dari sosiologisnya serta rasionalitanya sebelum menetapkan pilihan”²⁵

Dari uraian diatas yang di jelaskan oleh anggota DPRD Kabupaten Barru bahwa perilaku pemilih sangatlah berpengaruh tinggi dan jelas bahwa perilaku pemilih juga sangat berpotensi dalam menetapkan pilhan kandidat dalam suatu pemilihan. Keikutsertaan dalam pemilihan pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada atau kepala desa. kemudian akan menunjukkan perilaku mereka dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat. Dalam pembahasan akan diuraikan satu aspek pada penelitian ini. Yaitu faktor yang menentukan perilaku pemilih di kabupaten Barru . Perilaku pemilih pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada atau kepala Berikut akan diuraikan lebih lanjut.

A. faktor yang menentukan perilaku pemilih di kabupaten Barru

Untuk melihat perilaku pemilih ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior*,²⁶ menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih . Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

²⁵ Hasil wawancara dengan anggota DPRD kabupaten Barru dari Dapil 1, di , pada 15 juni 2015

²⁶ Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983)

Perilaku pemilih di kabupaten barru dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya pada umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian karena hampir semua informan yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sama dengan pilihan orang tuanya. Dimana Menurut peneliti, pilihan perilaku pemilih tersebut tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilihan. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan, salah satu dari mereka yakni saudari Muliati , menyatakan:

“Pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada atau kepala desa di kabupaten barru ini saya memberikan suara dan menjatuhkan pilihan saya kepada kandidat tersebut karena orang tua juga demikian”²⁷

Tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh Hendra , sebagai berikut:

“Semua keluarga saya memilih kandidat itu, Makanya saya secara pribadi ikut memilih beliau”²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas yang di kemukakan oleh Muliati dan Hendra menunjukkan perilaku yang ikut-ikutan. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik dan benar dan informasi yang didapatkan cukup terbatas. Hal demikian lebih lanjut diutarakan oleh Muliati bahwa:

²⁷ Hasil wawancara dengan Muliati URT di Desa Tellum panua Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru, pada 13 Juni 2015

²⁸ Hasil wawancara dengan hendra Di desa Anabanua Kecamatan Barru , Kabupaten Barru pada 13 Juni 2015

“Hanya beberapa calon kandidat yang saya ketahui, itupun tidak tahu secara mendalam sehingga tidak melihat secara keseluruhan mana yang berpotensi dan baik untuk saya pilih sebagai pemimpin.”²⁹

Pernyataan di atas jelas bahwa pemilih tidak tersentuh atau mendapatkan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin dan wakil mereka yang cocok dengan mereka. Selain itu perilaku ikut-ikutan demikian juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya.

Hal ini sejalan dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang³⁰. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dsb. Namun, Perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter³¹ menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah

²⁹ Hasil wawancara dengan Muliati URT di Desa Tellum panua Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru, pada 14 Juni 2015

³⁰ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta

³¹ Ibid hal: 495

seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya.

Pada proses paling dini, pembentukan sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka terhadap isu-isu politik dsb.” Pendek kata, bagi Mark N.Franklin³²sekolah dan teman sebaya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah., ikatan-ikatan sosilogis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang.

Sejalan dengan itu, Dalam penelitian ini tidak banyak diantara pemilih yang preferensi pilihannya sama dengan orang tuanya karena faktor ikut-ikutan tapi juga karena mendapat arahan/desakan dari orang tuanya. Mereka ikut berpartisipasi itu karena arahan/desakan orangtua untuk memilih kandidat yang sama dengan orangtuanya. Seperti yang diutarakan oleh Wahyullah, menyatakan bahwa:

*“sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilihan namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka pilih maka saya ikut saja.”*³³ Tidak berbeda dengan yang diutarakan Rusniah, menyatakan bahwa: *“saya sudah memperoleh kartu pemilih, jadi sebuah kewajiban bagi saya untuk memilih. Meskipun saya tidak faham apa itu pemilihan. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang kandidat*³⁴

Dari petikan pernyataan di atas yang diutarakan Wahyullah bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya karena tidak tahu-menahu menunjukkan karena mereka kurang paham atau mengetahui isu politik. Model perilaku ini tidak

³² ibid 77

³³ Hasil wawancara dengan wahyullah, 18 Tahun, pada 13 Juni 2015 di Desa kading Kecamatan Tanete Riaja , Kabupaten Barru

³⁴ Hasil wawancara dengan Rusniah, 19 tahun, pelajar, pada 14 Juni 2015, di Desa Gattareg, Kecamatan pujanating , Kabupaten Barru.

banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senangtiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini perilaku pemilih ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Perilaku demikian merupakan partisipasi yang dimobilisasi.

Menurut Huntington dan Nelson³⁵ mengenai partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin atau wakilnya yang tepat di daerahnya.

Menurut peneliti, perilaku pemilih mudah ini mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi.

Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih menyerap informasi berupa isu-isu tema dan kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dll. Lebih lanjut menurut peneliti, bahwa adanya pemilih yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe Apatis mereka. tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Akibatnya mereka kurang terlibat dalam pemilihan seperti menjadi tim sukses atau menjadi anggota partai politik. Selain itu pula tidak mengikuti perkembangan informasi dan isu-isu politik yang terjadi. Pertanyaan lebih

³⁵ Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/> diakses pada 14 Juni 2015)

mendetail kemudian peneliti mencoba mengajukan pertanyaan guna memperoleh gambaran yang jelas meliputi, dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada 9 april 2014 tersebut siapa calon Anggota yang menjadi pilihan saudara dan saudari dan apa alasan kemudian memilih calon tersebut ?. Dari hasil penelitian ini, banyak diantara pemilih yang di yang diwawancarai menjustifikasi pilihan politiknya dari calon anggota DPRD (dewan perwakilan daerah) dari Partai Golkar dan PPP (partai persatuan Pembangunan) NASDEM ,PKS,PDIP,DEMOKRAT ,GERINDRA, HANURA. Masing masing menepatkan kadernya duduk di DPRD Kabupaten Barru sejumlah 25 orang berdasarkan hasil pemilihan tahun 2014. Dan peneliti mendengar penuturan mereka bahwa alasan memilih karena adanya kesamaan sebagai putra daerah dapil Masing-masing dan sangat berpengaruh pada daerah tersebut. Sebagian besar pemilih yang diteliti lebih melihat calon calon yang terpilih yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barru yang terpilih sebagai putra daerah yang sangat ideal menjadi pemimpin dan menampung aspirasi masyarakat Berikut pendapat salah satu informan yang diwawancarai ketika ditanya tentang figur anggota DPRD yg terpilih oleh Jamaluddin menyatakan:

“saya memilih orang sini juga. Yang berasal dari daerah kita, buat apa kita memilih pemimpin lain sementara kita memiliki calon pemimpin dari daerah kita sendiri selain itu punya hubungan emosional dengan masyarakat sini”³⁶

Dari uraian pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa anggota DPRD Kabupaten Barru yang terpilih menentukan tingginya Prilaku Memilih di lihat dari sudut pandang sosiologisnya masyarakat memilihnya di Kabupaten Barru. Dari fenomena tersebut dijelaskan pada pendekatan sosiologis yang melihat perilaku pemilih dimana seperti dalam Penelitian Pern Arnt Peterson dan Lawrence E. Rose di Norwegia. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ikatan-ikatan kedaerahan, seperti desa-kota, merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang. Ikatan kedaerahan

³⁶Hasil wawancara dengan Jamaluddin 50 tahun, wiraswasta, pada 16 Juni 2015 di Kelurahan Lompo Riaja ,kabupaten Barru

terutama sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap calon . Penelitian Potoski menunjukkan bahwa para kandidat presiden atau parlemen, umumnya lebih diterima dan dipilih para pemilih yang berasal dari daerah yang sama.

Begitu kuatnya posisi variable kedaerahan ini, ketika melaporkan penelitiannya Potoski mengawali tulisannya sebagai berikut: *“it is a political axiom that candidates tend ti poll better in their home areas than they do elsewhwre”*. (suatu aksioma politik jika para kandidat cenderung lebih baik memilih di sekitar rumahnya daripada mereka harus melakukannya ditempat lain).

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama suku dan ras.³⁷

2. Pendekatan Psikologis

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.³⁸ Namun, figur calon yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih , Mengingat kecenderungan pemilih menjatuhkannya pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan. Sebagaimana yang di ungkapkan seorang informan Muh Nur ketika diwawancarai:

³⁷ Dieter Roth hal 23-26

³⁸ Ibid 49

“pemilhan Aggota Legeslatif Kabupateu Barru pada tahun 2014 wajib disukseskan, oleh karena itu wajib sebagai pemilih untuk ikut memilih. Apalagi ada calon yang “jagoan” saya yang ikut menjadi calon Aggota DPRD”³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan adanya perilaku yang psikologis pada pemilih . Dimana pemilih menjatuhkan pilihan pada figur kandidat yang mereka idolakan. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut peneliti , adanya perilaku psikologis ini tidak kedekatan pemilih terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang calon, khususnya bagi bagi para calon yang hendak mencalonkan kembali karan tidak terpilih , di antaranya kualitas kompetensi, dan integritas kandidat.⁴⁰ Sebagaimana penilaian yang diutarakan oleh salah satu informan Nurjanna , menyatakan:

“saya lebih memilih kandidat yang sudah terbukti mampu memimpin dan selain itu, Saya lebih mengenal kandidat tersebut di bandingkan dengan kandidat lainnya karena karna memang dia memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik”⁴¹

Pernyataan di atas jelas menggambarkan adanya evaluasi terhadap calon. Dimana telah dibahas sebelumnya bahwa evaluasi terhadap calon ini karena sejarah atau masa lalu kandidat. Hal ini yang kemudian mempengaruhi penilaian pemilih terhadap kandidat. Berbeda dengan yang diutarakan infoman lain, Herlin, menyatakan bahwa:

“beliau orang baik dan berpengaruh di daerah saya jadi keluarga kenal baik dengannya, karena sosoknya yang perhatian serta bermasyarakat”⁴²

³⁹Hasil wawancara dengan muh Nur ,pada 14 juni 2015.

⁴⁰Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. 2012. Bandung:Alfabeta

⁴¹ Hasil wawancara dengan Nurjanna pada tanggal 16 Juni 2015

⁴² Hasil wawancara dengan Herlin pada tanggal 16 Juni 2015

Pernyataan di atas menunjukkan adanya ikatan emosional dari pemilih terhadap kandidat. Menurut penulis penilaian Herliana kandidat karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang ia terima. Perilaku tersebut di jelaskan oleh Mark N. Franklin, “sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih”⁴³ Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, merupakan variable yang cukup menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis, menurut Richard Rose dan Ian Mc. Allicer, menekankan pada tiga Aspek psikologi sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.⁴⁴

Menurut peneliti, Dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkebang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key.⁴⁵ menurut key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya

⁴³ Ibid 23

⁴⁴ Ibid 24

⁴⁵ Ibid 47

sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya. Secara independen ada dua informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan Halikman , ketika diwawancarai menyatakan:

“saya pilih calon ada beberapa hal, yaitu karena kandidat tersebut memiliki banyak penghargaan, sudah terbukti memiliki kepemimpinan yang baik, ini dapat dilihat dari keberhasilannya membangun daerah”⁴⁶

Pernyataan di atas tidak berbeda dengan yang diutarakan oleh supriadi , ketika diwawancarai menyatakan: *“katanya visi-misi yang ditawarkan sangat bagus dan masuk akal. Khususnya dalam pertanian, dan daerah kita adalah daerah pertanian, saya sangat suka dengan programnya”⁴⁷*

Pernyataan yang sama juga diutarakan informan lainnya. Berikut petikan jawaban yang diutarakan oleh Hamka menyatakan: *“menurut saya Anggota DPRD yang terpilih adalah pemimpin yang baik menjabat sebagai Anggota DPRD lalu banyak perubahan dari berbagai bidang, seperti ada perbaikan jalanan dsb”*

Ketika petikan di atas yang diungkapkan oleh Halikman, secara independen menjustifikasi pilihannya dengan alasan rasional. Disinilah kita dapat melihat adanya perilaku yang rasional pada pemilih . Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni *orientasi isu* dan *orientasi kandidat*. Menurut Key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.⁴⁸ Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara *retrospektif*, yaitu dengan

⁴⁶ Wawancara Dengan Halikman pada Tanggal 15 Juni 2015

⁴⁷ Wawancara Dengan supriadi pada Tanggal 15 Juni 2015

⁴⁸ Ibid

menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya.

Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pertanyaan lebih lanjut diberikan kepada informan mengenai apakah pada saat pemilihan mereka pernah memperoleh imbalan berupa uang atau barang-barang dari calon maupun tim sukses calon tersebut.

Pertanyaan ini terkait, konsep pilihan rasional yang menjelaskan bahwa pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Dalam kalangan pemilih tidak ada keuntungan secara objektif yang mereka dapatkan. Sebagaimana yang diutarakan Halikman, ketika diwawancarai menyatakan:

“tidak ada sama sekali. Tidak ada politik uang saat pemilihan. Saya memilih pilihan saya bukan karena uang atau barang, saya tidak akan menjual suara. Saya memilih murni karena memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin”

Pernyataan lain yang diutarakan Khaerunisa menyatakan:

“saya memilih memang karena memang sudah waktunya untuk memilih tanpa adanya imbalan dari kandidat manapun juga kandidat yang menjadi pilihan saya.

*Saya memilih seorang calon karena melihat kandidatnya, selain itu satu keluarga saya memilih pasangan calon berdasar Hati nurani masing –masing*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pemilih tidak pernah menerima uang, barang, maupun berbagai bentuk jasa yang ditawarkan oleh calon pada saat pemilihan, saat pemilihan juga tidak ada terjadi politik uang dan barang dimana para informan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima apapun dari calon kandidat pada pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada dan kepala desa di Kabupaten Barru . Pemilih dalam memilih tidak memperoleh keuntungan apapun dalam memberikan kemenangan pada calon telah terpilih. Meskipun tidak banyak/beberapa diantara mereka mencoba memberikan alasan yang rasional dengan mengungkapkan keberhasilan dan visi-misi yang ditawarkan oleh kandidat tertentu. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan. Pemilih dalam memilih juga tidak memandang uang atau barang sebagai acuan dalam memilih.

Hasil penelitian peneliti pemilu yang mengacu kepada Lazarsfeld adalah memberikan suara dalam pada pemilihan umum, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada dan kepala desa pada dasarnya adalah suatu pengalaman kelompok. Perubahan perilaku pemilu seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial individu tersebut. Pengaruh terbesar berasal dari keluarga dan lingkungan rekan/sahabat erat individu terkait.

Menurut pandangan peneliti-peneliti dalam studi ini, sebelum pemilu diadakan masing-masing anggota diikat kepada predisposisi kelompoknya. Singkatnya, menurut Dieter Roth, “perilaku memilih seseorang dalam pemilu cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial di mana ia berada”. Sementara, bagi Nimmo, pendekatan sosiologis menjelaskan “karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan factor yang mempengaruhi

⁴⁹ Wawancara Dengan Khaerunisa pada Tanggal 15 Juni 2015

perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah pengalaman kelompok”.

Studi empiris lebih lanjut dari Barelson dkk (1954) membuktikan bahwa setiap orang berusaha untuk mempertahankan homogenitas lingkungan sosialnya demi menghindari konflik. Homogenitas lingkaran sosial jarang ditemukan dalam masyarakat modern karena masyarakat ini memiliki mobilitas ruang dan sosial yang kuat, hal mana pada akhirnya cenderung mengakibatkan putus/hilangnya hubungan-hubungan yang ada. Keterkaitan individu dengan beberapa medan kekuatan sosial (yang kadang saling bertentangan satu sama lain) disebut *cross pressure*. Teori yang menggunakan pendekatan ini, menurut Martin Harrop dan William Miller, adalah *contagion theory* atau teori penularan. Menurut teori ini, pilihan politik seseorang dan *partisipanship* (semangat berpartisipasi seseorang dalam kehidupan politik) dapat menular kepada orang lain melalui kontak sosial seperti penyakit infeksi. Dengan kata lain, perilaku politik seseorang disebabkan apa yang dibicarakan bersama yang akhirnya menjadi pilihan bersama.⁵⁰

Hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Pomper predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dsb.

Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan

⁵⁰ Ibid 68

dan sosial mereka, termasuk peran politiknya. Pada proses paling dini, pembentukan sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga. pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka terhadap isu-isu politik dsb.” Pendek kata, bagi Mark N.Franklin, ikatan-ikatan sosiologis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang.⁵¹

Pada penelitian ini, menemukan bahwa yang mempengaruhi keputusan seorang pemilih, yakni lingkungan tempat tinggal mereka yang tidak lain adalah lingkungan keluarga. Seperti dalam Dasar model penjelasan mikrososiologis berasal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg simmel (1890).

Pada akhir abad lalu. Menurut teori ini, setiap manusia terikat dalam beberapa lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal dsb.Akibatnya, preferensi politik atau kesamaan pilihan dalam lingkungan keluarga lazim terjadi. Adapun faktor-faktor yang menetapkan pilihan pada perilaku pemilih dan tingginya preferensi politik atau kesamaan tersebut terhadap pemilih di Kabupaten Barru tahun 2015, adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang cukup terbatas, informasi berupa isu-isu tema, pada pemilihan calon anggota DPRD pertukaran informasi tidak terjadi secara umum, tidak terjadi secara umum dalam hal ini maksudnya sulitnya akses informasi di lingkungan masyarakat yakni Tidak ada media informasi yang tersedia. Pertukaran informasi terkait partai politik, isu-isu tema, dan kandidat hanya terjadi dari satu individu ke individu yang lain. Pertukaran informasi atau juga disebut dengan proses sosialisasi paling mudah terjadi di lingkungan keluarga. mengingat bahwa keluargalah adalah kelompok terkecil dalam suatu masyarakat dan setiap saat kita berkomunikasi dengan mereka. akibatnya informasi banyak dan mudah

⁵¹ Ibid 494

diserap. Sebagaimana yang diutarakan Informan Kaherunisa menyatakan: “*saya memperoleh informasi tentang pemilu serta calon kandidat yang berkompetisi saat itu hanya dari lingkungan keluarga khususnya orangtua saya, selain itu di tetangga saja.*”⁵² Berikut jawaban informan lain dengan pertanyaan yang sama, yaitu Syamsuddin menyatakan: “*pada pemilu lalu informasi yang saya dapatkan dari orangtua saya dan di radio kadang-kadang kalau sedang keluar daerah*”⁵³

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, informasi mengenai calon kandidat mereka dapat seadanya, terlebih daripada itu mereka tidak memiliki keinginan untuk mencari informasi yang lebih mengenai calon tersebut. Menurut penulis, para pemilih memang menyerap informasi tapi mereka tidak mencari dan mengolah informasi dengan aktif mereka mendapat informasi sebagai produk sampingan dari berbagai aktivitas sehari-hari. Terjadinya hal demikian karena Mereka tidak memperoleh informasi yang cukup. Mereka tidak mampu untuk memeriksa akurasi informasi yang yang cukup. Fenomena inilah yang dipostulatkan Popkin sebagai hukum *Law information rationality* (rasionalitas berdasarkan informasi terbatas) atau *gut rationally* (logika perut).

Informasi mengenai pemilu, pilkada dll sendiri banyak diperoleh dari orangtuanya dan radio yang memberitakan pelaksanaan pemilu. Namun, informasi dari orangtualah yang paling berpengaruh pada Pemilih tersebut. Karena kegiatan sehari-hari banyak terjadi di lingkungan keluarga, menyebabkan akses komunikasi yg diterima di lingkungan keluarga lebih mudah.

Dapat dikatakan bahwa rasionalitas pada pemilih tidak lepas dari informasi yang didapatkan di lingkungan keluarganya. Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan rasional diuraikan di atas berkaitan dengan adanya pengaruh sosiologis dikalangan pemilih pada penelitian ini. Dimana pilihan pemilih dipengaruhi oleh informasi yang diserap di lingkungan keluarganya dan menyebabkan preferensi pilihan pemilih sama dengan orangtua mereka.

⁵² Wawancara dengan kaherunisa pada Tanggal 15 Mei 2015

⁵³ Wawancara dengan sayamsuddin pada tanggal 16 Mei 2015

Ketidak mampuan pemilih dalam menetapkan pilihan yang cocok. Hal ini disebabkan karena pemilih di Kabupaten Barru tidak tersentuh atau mendapat pendidikan politik yang cukup sejak dini, khususnya dalam bagaimana menentukan kandidat yang tepat dan cocok dengan mereka. Akibatnya, mereka mudah diintimidasi, Partisipasi yang diintimidasi Menurut Huntington dan Nelson⁵⁴ mengenai partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dan partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain rentang terjadi sekalipun itu berasal dari lingkungan keluarga. hal tersebut sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, Perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan sang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat didaerahnya. Menurut penulis, perilaku pemilih ini mudah di pengaruhi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih belum terlalu mampu menetapkan pilihan dengan sendirinya.

2. Faktor sikap Apatis pemilih. Prefensi politik atau kesamaan pilihan di lingkungan keluarga juga disebabkan karena adanya sikap Apatis pemilih. Apatis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sikap Acuh tidak acuh, tidak peduli, atau masa bodoh. Apatis adalah sikap yang menolak dengan tegas keterlibatan pemilih terjun dalam politik praktis semisal menjadi tim sukses. Namun tidak secara ekstrim menolak untuk tidak berpartisipasi, khususnya pada pemilu. Bagi pemilih Apatis, keterlibatan atau partisipasi politik pemilih cukup diwujudkan dalam bentuk memilih kandidat yang ada untuk menjaga netralitas serta idealismenya. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara dengan sri devi menyatakan:

⁵⁴ Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/> diakses pada 14 Juni 2015)

“sebenarnya saya tidak tahu-menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilu namun karena orangtua mengajak untuk memilih kandidat mereka maka saya ikut memilih”⁵⁵

Pernyataan di atas bahwa mereka sebenarnya tidak ingin terlibat atau berpartisipasi, jelas menunjukkan sikap Apatis pemilih terhadap pentingnya memberikan suara dalam pemilihan sebagai warga Negara. Sri devi juga mengutarakan tidak tahu menahu dengan perkembangan isu politik yang terjadi selama pemilu berlangsung. Namun, ia tetap berpartisipasi sebagai wujud netralitasnya dalam lingkungan keluarga.

3. Kepatuhan anak terhadap orangtua. Kepatuhan anak terhadap orangtua lazim terjadi pada masyarakat pedesaan. Dimana daerah pedesaan merupakan daerah yang dalam lingkaran sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu. Norma tersebut menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tenang tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya, sekalipun dalam lingkungan keluarga. Sama halnya dengan kepatuhan anak terhadap orangtua mereka. Pada faktor ini, seorang anak akan meyakini apapun keputusan dan pilihan dari orangtua mereka.

Begitupun dalam hal menetapkan atau menjatuhkan pilihan terhadap seorang kandidat pada pemilihan. Pada pemilu di Kabupaten Barru faktor ini juga melatar belakangi perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya terhadap seorang kandidat. hal tersebut sejalan dengan Paul F. Lazarsfeld⁵⁶ menerangkan cara pikir ini kepada pemilih. Setiap pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya, dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi.

⁵⁵ Wawancara dengan sri devi pada tanggal 16 juni 2014

⁵⁶ Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Alfabeta hal : 493

Namun, konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya. Ke empat faktor yang diuraikan di atas adalah faktor yang melatarbelakangi tingginya preferensi politik atau kesamaan pilihan pemilih di Kabupaten Barru. Hal demikian karena pada umumnya dan hampir semua informan yang diwawancarai menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat karena pengaruh baik dari sosiologisnya, psikologisnya dan pilihan rasional.

Jadi peran dari orang tua keluarga sahabat serta penyampaian visi misi dari calon dalam hal ini sangat menentukan perilaku pemilih, terkhusus dalam dunia politik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih yang menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana adanya faktor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku pemilih terhadap seorang kandidat. Selain itu, juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih .
2. Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. Hal itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara faktor sosiologis dan psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini dilatar belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana pemilih dalam menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat dan kemudian menentukan sikap.
3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih yang menunjukkan model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak sedikit diantara pemilih yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Dimana informasi yang didapatkan atau diterima pemilih lebih dominan berasal dari argument atau pendapat masyarakat, orangtuanya, serta media Massa yang kemudian membentuk perilaku rasional.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Masih kurangnya peran partai politik dalam mensosialisasikan cerdas dalam memilih kepada pemilih khususnya daerah-daerah terpencil. Perlunya diadakan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka tidak mudah diiming-imingi dan berani menentukan pilihannya sendiri tanpa harus diarahkan oleh siapapun.
- b. Kembalikan uji public sebagai salah satu tahapan pikada, karena dengan uji public dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berpolitik secara rasional. Anggapan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pemilu dapat terkikis secara perlahan, menuju pemilu yang berkualitas dan terpercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar. . *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Anthony Downs: *An Economic Theory of Democracy*.(1957)

Alwis, *Jurnal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau* 2001

Bryan Caplan ; 2007, *The Myth of Rational Voter*.

Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (London: Allen and Unwin, 1983)

Dewi Erowati dalam *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Volume 2/Nomor 2/Desember 2004

Efriza.*Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. 2012. Bandung:Alfabeta

Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Gramedia. Pustaka Utama Jakarta.

Makalah-tentang-partisipasi-politik. html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/> diakses pada 12 juni 2015)

Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udin-note.blogspot.com/2013/09/> diakses pada 14 Juni 2015)

Makalah-tentang-partisipasi-politik.html (<http://udinnote.blogspot.com/2013/09/> diakses pada 14 Juni 2015)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007,

Saifullah Fatah dalam buku political explorer (2012 : 487)

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat (2012

Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.

<http://rickyaliazar.blogspot.com/2014/06/partisipasi-pemilih-dalam-pemilihan.html> Di Akses Pada tanggal 9 Juni 2015

<http://politik.kompasiana.com/2011/04/13/perilaku-pemilih-di-kotayogyakarta-fenomena-pemilu-2004-dan-2009> diakses pada tanggal 10 juni 2015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

wawancara



sumber

:Wawancaradengananggota KPU Kabupaten Barru Devisi Program Data, Upi
Hastuti, S. Ag, MA

Barru, 15 Juni 2015.



Sumber: wawancara dengan Syamsuddin, S.Pd.I (Guru SD)



Sumber :Wawancara dengan Hendra (Mahasiswa STAI Al Gazali



Barru)

Sumber: Wawancara dengan, A.Wawo Mannoengi, SH (Anggota DPRD Kab.Barru)



Sumber: Wawancara dengan Khaerun Nisa (guru SD)



Sumber: Wawancara dengan petani Daerah Tanete Riaja.